

ANALISIS FRAMING PERNYATAAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA PRASETYO HADI DALAM MEMPERTAHANKAN LEGITIMASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Andriansah

andriansah@fasos.ukri.ac.id, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

Abstract. *The Free Nutritious Meal Program (MBG) is one of the Indonesian government's priority programs aimed at improving public nutrition. However, the program has faced criticism from several civil society organizations calling for evaluation and a temporary moratorium. This study aims to analyze the government's crisis communication strategy in maintaining the legitimacy of the MBG Program through the framing constructed by the Minister of State Secretary, Prasetyo Hadi. This study employs a qualitative approach using Robert N. Entman's framing analysis. Data were collected from Prasetyo Hadi's official statements published in mass media reports. The findings indicate that the government framed the MBG controversy as a technical governance issue rather than a policy failure. The government emphasized the program's benefits for vulnerable groups and 3T regions while proposing governance improvements and comprehensive evaluation without suspending the program. The study concludes that framing was used as a crisis communication strategy to maintain public support and policy legitimacy.*

Keywords: *crisis communication, framing, legitimacy, Free Nutritious Meal Program, Prasetyo Hadi.*

Abstrak. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, program ini menghadapi kritik dari sejumlah organisasi masyarakat sipil yang menuntut evaluasi dan moratorium sementara. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi krisis pemerintah dalam mempertahankan legitimasi Program MBG melalui framing yang dibangun oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing Robert N. Entman. Data diperoleh dari pernyataan resmi Prasetyo Hadi yang dimuat dalam pemberitaan media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah membingkai polemik MBG sebagai persoalan teknis yang memerlukan perbaikan tata kelola, bukan kegagalan program secara keseluruhan. Pemerintah juga menekankan manfaat program bagi kelompok rentan dan wilayah 3T serta menawarkan solusi berupa evaluasi dan penataan ulang tata kelola tanpa menghentikan program. Temuan ini menunjukkan bahwa framing digunakan sebagai strategi komunikasi krisis untuk mempertahankan legitimasi dan dukungan publik terhadap Program MBG.

Kata kunci: Komunikasi krisis, framing, legitimasi, Program Makan Bergizi Gratis, Prasetyo Hadi.

PENDAHULUAN

Komunikasi politik merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Dalam sistem demokrasi, pemerintah tidak hanya dituntut menghasilkan kebijakan yang berkualitas, tetapi juga mampu mengomunikasikannya secara efektif kepada masyarakat. Komunikasi pemerintah berperan dalam membangun legitimasi, memperoleh dukungan publik, mengelola persepsi, serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Di era digital, fungsi tersebut semakin strategis karena arus informasi yang cepat melalui media massa dan media sosial dapat membentuk opini publik secara positif maupun negatif. Salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Sebagai program strategis nasional dengan cakupan luas dan anggaran besar, MBG mendapat perhatian publik sekaligus tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaannya.

Dalam perkembangannya, muncul dugaan kasus korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG. Isu tersebut memunculkan perhatian dari masyarakat, media massa, organisasi masyarakat sipil, dan pengamat kebijakan publik. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan potensi kerugian negara, tetapi juga berimplikasi terhadap kepercayaan masyarakat dan legitimasi program. Dalam kondisi demikian, pemerintah menghadapi tantangan komunikasi untuk menjelaskan persoalan sekaligus menjaga keberlanjutan tujuan utama MBG.

Fenomena tersebut dapat dipahami sebagai krisis komunikasi karena berpotensi memengaruhi reputasi, kredibilitas, dan legitimasi pemerintah. Dalam perspektif komunikasi krisis, respons institusi terhadap suatu persoalan menjadi penting dalam mengendalikan persepsi publik. Pemerintah kemudian menyampaikan berbagai pernyataan resmi yang menekankan transparansi, penegakan hukum, serta keberlanjutan MBG. Salah satu figur yang memiliki posisi strategis dalam komunikasi tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Pernyataan Prasetyo menarik dikaji karena komunikasi pejabat pemerintah tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mengonstruksi makna atas suatu peristiwa. Dalam perspektif komunikasi politik, konstruksi tersebut dapat dianalisis melalui konsep framing. Menurut Robert N. Entman, framing merupakan proses menyeleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas untuk membentuk definisi masalah, interpretasi penyebab, evaluasi moral, dan rekomendasi penyelesaian. Dengan pendekatan ini, komunikasi pemerintah terkait dugaan korupsi MBG dapat dikaji berdasarkan bagaimana masalah didefinisikan, penyebab dan pihak yang bertanggung jawab dikonstruksikan, nilai evaluatif yang digunakan, serta solusi yang ditawarkan kepada publik.

Kajian framing komunikasi pemerintah menjadi penting karena respons komunikasi dalam situasi krisis dapat memengaruhi tingkat kepercayaan dan penerimaan publik terhadap kebijakan. Komunikasi yang cepat, terbuka, dan konsisten dapat mendukung pengelolaan krisis, sedangkan komunikasi yang ambigu atau kontradiktif berpotensi memperburuk persepsi publik. Hal ini semakin relevan dalam konteks MBG karena program tersebut merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh dukungan dan legitimasi masyarakat.

Secara akademik, penelitian mengenai komunikasi politik dan komunikasi krisis telah berkembang dalam berbagai konteks, seperti kampanye politik, kebijakan publik, dan komunikasi krisis korporasi. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis framing komunikasi krisis pemerintah dalam menghadapi dugaan penyimpangan pada program

prioritas nasional, khususnya melalui pernyataan pejabat pemerintah, masih memerlukan pengembangan. Penelitian ini menempatkan fenomena MBG sebagai konteks untuk melihat bagaimana narasi pemerintah dibangun dalam situasi yang berpotensi memengaruhi legitimasi kebijakan.

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan publik tidak hanya dinilai dari substansi dan capaian program, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengelola komunikasi ketika menghadapi kritik dan polemik. Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tuntutan moratorium dari sejumlah organisasi masyarakat sipil menunjukkan adanya persoalan komunikasi yang berpotensi memengaruhi kepercayaan dan legitimasi publik. Kajian ini menggunakan perspektif komunikasi krisis, framing, legitimasi, agenda setting, dan manajemen reputasi untuk menganalisis strategi komunikasi pemerintah dalam mempertahankan dukungan terhadap MBG.

Perspektif utama penelitian ini adalah Situational Crisis Communication Theory (SCCT) dari W. Timothy Coombs. Teori ini menjelaskan bahwa strategi komunikasi dalam situasi krisis perlu disesuaikan dengan tingkat tanggung jawab yang dipersepsikan publik. Salah satu strategi yang relevan adalah *corrective action*, yaitu pengakuan terhadap adanya persoalan yang disertai langkah perbaikan. Dalam polemik MBG, pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai perlunya penataan ulang tata kelola tanpa menghentikan program dapat dipahami sebagai bentuk *corrective action*. Pemerintah mengakui adanya persoalan implementasi, namun membingkainya sebagai masalah yang dapat diperbaiki dan tidak serta-merta menunjukkan kegagalan program secara keseluruhan.

Analisis tersebut diperkuat dengan teori framing Robert Entman, yang memandang bahwa realitas dikonstruksi melalui proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu. Framing mencakup pendefinisian masalah, identifikasi penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian. Dalam polemik MBG, pemerintah cenderung membingkai persoalan sebagai kebutuhan penyempurnaan tata kelola, sementara keberlanjutan dan manfaat program tetap ditekankan. Framing tersebut mengarahkan perhatian publik dari tuntutan penghentian program menuju agenda evaluasi dan perbaikan.

Selanjutnya, teori legitimasi Mark Suchman digunakan untuk melihat bagaimana komunikasi pemerintah mempertahankan penerimaan publik terhadap MBG. Legitimasi berkaitan dengan persepsi bahwa tindakan organisasi sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah membangun legitimasi MBG dengan menekankan tujuan program bagi kelompok rentan sekaligus menunjukkan komitmen terhadap evaluasi dan perbaikan pelaksanaan.

Penelitian ini juga memanfaatkan teori agenda setting McCombs dan Shaw untuk memahami persaingan isu dalam ruang publik. Kritik masyarakat sipil menempatkan persoalan implementasi sebagai agenda utama, sedangkan pemerintah berupaya menggeser perhatian pada agenda perbaikan tata kelola, perluasan manfaat, dan keberlanjutan program. Dengan demikian, komunikasi pemerintah tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga berperan dalam menentukan isu yang memperoleh perhatian publik.

Terakhir, perspektif manajemen reputasi Charles J. Fombrun digunakan untuk melihat upaya pemerintah mempertahankan citra institusional. Reputasi terbentuk dari akumulasi persepsi publik terhadap kinerja dan respons organisasi. Dalam konteks MBG, penekanan terhadap evaluasi, koreksi, dan keberlanjutan program menunjukkan upaya pemerintah mempertahankan citra sebagai institusi yang responsif dan adaptif terhadap kritik.

Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian ini memandang komunikasi pemerintah dalam polemik MBG sebagai strategi komunikasi krisis yang memadukan *corrective action* dan framing untuk mempertahankan legitimasi kebijakan serta reputasi pemerintah. Persoalan implementasi dikonstruksi sebagai masalah tata kelola yang dapat diperbaiki, bukan sebagai alasan untuk menghentikan program secara keseluruhan. Dengan demikian, komunikasi menjadi instrumen penting dalam mengelola krisis, membentuk agenda publik, dan mempertahankan dukungan terhadap keberlanjutan MBG.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing model Robert N. Entman untuk mengkaji strategi komunikasi krisis pemerintah dalam mempertahankan legitimasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami konstruksi makna dan realitas yang dibangun pemerintah melalui pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam merespons kritik dan tuntutan moratorium MBG.

Analisis framing Entman (1993) digunakan melalui empat perangkat, yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgment*, dan *suggest remedies*. Keempat unsur tersebut digunakan untuk mengidentifikasi cara pemerintah mendefinisikan persoalan MBG, menjelaskan penyebab, membangun penilaian terhadap isu, serta menawarkan solusi sebagai bentuk respons terhadap kritik publik.

Objek penelitian berupa pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai evaluasi dan penataan ulang MBG yang diberitakan media daring sebagai respons terhadap tuntutan moratorium pada Juni 2026. Data primer berupa teks pemberitaan yang memuat pernyataan tersebut, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, kemudian data dianalisis berdasarkan empat perangkat framing Entman. Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan menggunakan perspektif komunikasi krisis dan legitimasi kebijakan untuk melihat strategi pemerintah dalam membangun persepsi dan mempertahankan dukungan publik terhadap MBG. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teori, dengan membandingkan temuan framing dengan konsep komunikasi krisis, legitimasi, dan agenda setting. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai konstruksi komunikasi pemerintah dalam menghadapi polemik MBG.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi adalah bentuk strategi komunikasi krisis yang dirancang untuk mempertahankan legitimasi Program Makan Bergizi Gratis di tengah meningkatnya kritik publik. Melalui framing tertentu, pemerintah berupaya mengonstruksi realitas bahwa polemik yang muncul tidak berkaitan dengan kegagalan kebijakan, melainkan dengan kebutuhan untuk memperbaiki tata kelola program.

Temuan ini sejalan dengan *Situational Crisis Communication Theory (SCCT)* yang dikemukakan Coombs. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa organisasi yang menghadapi krisis dapat mempertahankan reputasinya melalui strategi tindakan perbaikan (*corrective action*). Pernyataan Prasetyo Hadi memperlihatkan pola komunikasi yang menekankan

evaluasi, penataan ulang, dan komitmen perbaikan sebagai respons terhadap kritik yang berkembang.

Selain itu, hasil penelitian juga memperlihatkan bagaimana framing digunakan sebagai instrumen politik komunikasi untuk membentuk persepsi publik. Pemerintah secara aktif mengarahkan perhatian masyarakat pada manfaat program, kelompok penerima manfaat, serta komitmen perbaikan yang sedang dilakukan. Strategi ini menunjukkan bahwa framing tidak hanya berfungsi menjelaskan suatu peristiwa, tetapi juga menjadi sarana untuk mempertahankan dukungan terhadap kebijakan publik.

Dari perspektif teori legitimasi, komunikasi pemerintah menunjukkan upaya mempertahankan legitimasi pragmatis, moral, dan kognitif secara bersamaan. Legitimasi pragmatis dibangun melalui penekanan pada manfaat nyata yang telah diterima masyarakat. Legitimasi moral dibangun melalui narasi keberpihakan kepada kelompok rentan dan daerah 3T. Sementara itu, legitimasi kognitif dibangun dengan menempatkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari agenda besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi krisis pemerintah tidak hanya bergantung pada kemampuan menjelaskan masalah, tetapi juga pada kemampuan membangun narasi yang mampu menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan yang sedang dijalankan. Dalam kasus Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah memilih strategi framing yang menekankan perbaikan tata kelola, keberlanjutan program, dan keberpihakan kepada kelompok rentan sebagai upaya mempertahankan legitimasi di tengah kritik dari masyarakat sipil.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berfungsi sebagai instrumen komunikasi krisis yang bertujuan menggeser narasi publik dari isu kegagalan program menuju isu reformasi tata kelola. Melalui strategi tersebut, pemerintah berupaya menjaga dukungan publik sekaligus memperkuat legitimasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas nasional.



Sumber: Kompas.com

Gambar 1

Prasetyo Hadi menyampaikan hasil rapat Layanan MBG dan SPPG Terpencil

Table 1 Analisis Framing Robert Entman terhadap Pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Perangkat Framing Entman	Kutipan Pernyataan Prasetyo Hadi	Analisis Framing
Define Problems (Pendefinisian Masalah)	<i>"Karena memang kan sebetulnya ada klasternya ya, ada klaster permasalahan. Jadi yang sebagian besar kan berjalan sesuai dengan mekanisme dan SOP yang sudah ditetapkan, jadi itu jalan terus."</i>	Pemerintah mendefinisikan polemik MBG bukan sebagai kegagalan program secara keseluruhan, melainkan sebagai permasalahan yang hanya terjadi pada beberapa klaster pelaksanaan. Framing ini bertujuan menjaga persepsi publik bahwa program secara umum berjalan baik dan tetap memberikan manfaat kepada masyarakat.
Define Problems (Pendefinisian Masalah)	<i>"Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang, kita benahi."</i>	Masalah dikonstruksikan sebagai kebutuhan penataan ulang tata kelola. Pemerintah berupaya mengarahkan perhatian publik pada aspek teknis implementasi dibanding mempertanyakan substansi dan tujuan program.
Diagnose Causes (Identifikasi Penyebab)	<i>"Jadi memang kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari program MBG ini."</i>	Penyebab masalah dibingkai sebagai belum optimalnya tata kelola dan mekanisme pelaksanaan program. Pemerintah tidak mengaitkan masalah dengan kegagalan kebijakan, melainkan dengan aspek manajerial yang masih dapat diperbaiki.
Diagnose Causes (Identifikasi Penyebab)	<i>"Kalau bicaranya waktu tentu secepat-cepatnya."</i>	Pemerintah menunjukkan bahwa perbaikan sedang dilakukan secara aktif dan segera. Framing ini membangun citra responsif serta menunjukkan adanya keseriusan dalam menangani persoalan yang muncul.
Make Moral Judgment (Penilaian Moral)	<i>"Termasuk tadi ada satu permohonan yang menurut kami juga bagus untuk kita segera prioritaskan juga di daerah yang 3T untuk bisa secepatnya saudara-saudara kita mendapatkan manfaat dari"</i>	Pemerintah membangun legitimasi moral program dengan menekankan keberpihakan kepada masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Program diposisikan sebagai

Perangkat Framing Entman	Kutipan Pernyataan Prasetyo Hadi	Analisis Framing
	<i>program makan bergizi gratis ini."</i>	instrumen pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Make Moral Judgment (Penilaian Moral)	<i>"Untuk ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita di bawah lima tahun."</i>	Framing moral diperkuat melalui fokus pada kelompok rentan (3B), yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Narasi ini menempatkan program sebagai upaya negara melindungi generasi masa depan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Suggest Remedies (Rekomendasi Solusi)	<i>"Jadi memang kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari program MBG ini."</i>	Solusi yang ditawarkan pemerintah adalah reformasi tata kelola dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Pemerintah menegaskan bahwa perbaikan sistem merupakan jalan keluar yang lebih tepat dibanding penghentian program.
Suggest Remedies (Rekomendasi Solusi)	<i>"Mohon dukungannya, mohon bersabar untuk kita kerja keras kita tata ulang semua."</i>	Pemerintah mengajak publik untuk mendukung proses pembenahan yang sedang dilakukan. Framing ini menunjukkan strategi komunikasi krisis berupa <i>corrective action</i> , yaitu mengakui adanya masalah sambil menegaskan komitmen memperbaikinya.

Sumber: hasil penelitian

Interpretasi Tabel

Berdasarkan analisis framing Robert Entman, pemerintah membangun narasi bahwa polemik MBG merupakan persoalan teknis yang terjadi pada sebagian kecil pelaksanaan program, bukan kegagalan kebijakan secara menyeluruh. Penyebab masalah diarahkan pada aspek tata kelola yang memerlukan pembenahan, sementara legitimasi program diperkuat melalui penekanan pada manfaat bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah 3T. Pada saat yang sama, solusi yang ditawarkan bukan penghentian program, melainkan penataan ulang dan perbaikan sistem secara menyeluruh. Framing tersebut menunjukkan upaya pemerintah mempertahankan legitimasi Program Makan Bergizi Gratis melalui strategi komunikasi krisis yang berorientasi pada perbaikan, keberlanjutan, dan keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan strategi komunikasi krisis untuk mempertahankan legitimasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah munculnya kritik dan tuntutan moratorium dari sejumlah organisasi masyarakat sipil. Melalui analisis framing model Robert Entman terhadap pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, ditemukan bahwa pemerintah secara konsisten membangun narasi yang menempatkan polemik MBG sebagai persoalan teknis dalam pelaksanaan program, bukan sebagai kegagalan kebijakan secara keseluruhan.

Pada aspek *define problems*, pemerintah mendefinisikan permasalahan sebagai adanya beberapa klaster yang memerlukan penataan ulang, sementara sebagian besar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Pada aspek *diagnose causes*, penyebab masalah dibingkai sebagai persoalan tata kelola dan implementasi yang belum optimal, bukan kesalahan dalam tujuan maupun desain kebijakan. Selanjutnya, pada aspek *make moral judgment*, pemerintah memperkuat legitimasi program dengan menekankan manfaat MBG bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Sementara itu, pada aspek *suggest remedies*, pemerintah menawarkan solusi berupa penataan ulang tata kelola, evaluasi menyeluruh, dan penguatan sistem pelaksanaan tanpa menghentikan program.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa framing yang digunakan Prasetyo Hadi merupakan bagian dari strategi komunikasi krisis yang berorientasi pada *corrective action*, yaitu mengakui adanya kendala dalam pelaksanaan program sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan perbaikan. Strategi tersebut bertujuan menggeser perhatian publik dari narasi kegagalan program menuju narasi reformasi tata kelola dan penyempurnaan kebijakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan, referensi, serta dukungan akademik sehingga penelitian mengenai strategi komunikasi krisis pemerintah dalam mempertahankan legitimasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Entman, R. M. (1993). *Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm*. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
- Coombs, W. T. (2007). *Protecting Organization Reputations During a Crisis: The Development and Application of Situational Crisis Communication Theory*. *Corporate Reputation Review*, 10(3), 163–176.
- Coombs, W. T. (2013). *Situational Theory of Crisis: Situational Crisis Communication Theory and Corporate Reputation*. In *The Handbook of Communication and Corporate Reputation*.
- Coombs, W. T. (2022). *Situational Crisis Communication Theory (SCCT)*. In *The Handbook of Crisis Communication*.

Suchman, M. C. (1995). *Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches*. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.

McCombs, M., & Shaw, D. L. (1972). *The Agenda-Setting Function of Mass Media*. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.

Fombrun, C. J. (1996). *Reputation: Realizing Value from the Corporate Image*. Boston: Harvard Business School Press.

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.

Coombs, W. T. (2007). Protecting Organization Reputations During a Crisis: The Development and Application of Situational Crisis Communication Theory. *Corporate Reputation Review*, 10(3), 163–176.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suchman, M. C. (1995). *Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches*. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.

Firda Janati, Jessi Carina (2026, Juni11). *Ramai desakan evaluasi BGN, Mensesneg janji tata kelola MBG diperbaiki*. Kompas.com.